



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman
<http://www.fisipundip.ac.id>

Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak

(Studi Kajian Periode 1979-2012)

Tunggul Ganggas Danisworo¹, Drs. Tri Cahyo Utomo, M.A², Dra. Puji Astuti, M.Si³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>/ Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Suku Kurdi merupakan salah satu etnis yang hidup di beberapa negara di Timur Tengah, mereka memiliki cita-cita dan ambisi menciptakan negara Kurdistan yang merdeka dan berdaulat. Namun setelah perang dunia pertama berakhir, mereka harus tinggal terpisah karena daerah Kurdistan oleh PBB dibagi menjadi beberapa negara berdaulat (Iran, Irak, Suriah dan Turki). Etnis Kurdi di Irak dalam sejarahnya merupakan etnis Kurdi yang paling agresif dalam menyampaikan aspirasinya dibandingkan dengan etnis Kurdi di negara lain. Mereka menciptakan sebuah gerakan nasionalisme etnis yang digunakan dalam rangka menuntut aspirasi mereka yaitu kemerdekaan Kurdi. Dimulai pada tahun 1919, Syakh Mahmud Barzanji mendeklarasikan perjuangan Kurdi di Irak lewat pemberontakan yang lebih dikenal sebagai revolusi Sulaymaniyah. Tidak terakomodasinya kepentingan Kurdi Irak oleh berbagai rezim yang silih berganti menguasai Irak, membuat pemberontakan etnis Kurdi di Irak terus berlanjut sampai akhirnya Irak dikuasai oleh rezim otoriter Saddam Hussein. Periode rezim Saddam Hussein merupakan periode terberat dalam sejarah etnis Kurdi. Berbagai kebijakan pembersihan etnis Kurdi Irak mulai digencarkan oleh rezim otoriter Saddam Hussein, namun disaat itu pula gerakan nasionalisme etnis Kurdi di Irak semakin bertambah kuat.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola strategi gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak pada masa kekuasaan Saddam Hussein hingga proses demokrasi masuk ke Irak (periode 1979-2012), serta menjelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan dalam rangka mengakomodasi kepentingan etnis Kurdi di Irak selama periode tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan konflik-konflik kontemporer yang melibatkan etnis Kurdi Irak sebagai aktor dalam konflik tersebut. Sehingga pada penelitian ini akan dapat dilihat bagaimana perubahan bentuk pola-pola gerakan nasionalisme Kurdi Irak dari masa ke masa serta pengaruh dibalik perubahan itu.

Kata kunci: Irak, Etnis Kurdi, Etnonasionalisme

¹Tunggul Ganggas Danisworo adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang. Alamat email : tunggul.ganggas@yahoo.com/tunggulganggas@gmail.com

²Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

Abstract

The Kurds are one of the ethnic groups living in several countries in the Middle East, they have goals and ambitions of creating an independent Kurdish state and sovereignty. But after the first world war ended, they had to live apart due to the Kurdistan region is divided into several sovereign countries (Iran, Iraq, Syria and Turkey) by the United Nations. Kurds in Iraq in the Kurdish history is the most aggressive in expressing their aspirations than the Kurds in other countries. They created an ethnic nationalist movement used in order to demand the freedom of Kurdish aspirations. Started in 1919, Mahmud Barzanji declare the Kurdish struggle in Iraq through the uprising known as Sulaymaniyah revolution. No accommodation of the interests of the Iraqi Kurds by successive regimes dominate Iraq, making Iraq's Kurdish ethnic rebellion continued until the end of Iraq controlled by the authoritarian regime of Saddam Hussein. The period of Saddam Hussein's regime was the toughest period in the history of ethnic Kurds. Various Iraqi Kurdish policy of ethnic cleansing began intensified by the authoritarian regime of Saddam Hussein, but when it is also movement in Iraq's Kurdish ethnic nationalism grew stronger.

This study describes how the patterns of strategy ethnonationalism Kurdish movement in Iraq during the reign of Saddam Hussein to go into Iraq's democratic process (period 1979-2012), as well as explaining what policies have been issued in order to accommodate the interests of Kurds in Iraq during that period. This study also describes contemporary conflicts involving Iraq's ethnic Kurds as an actor in the conflict. So in this research will be able to see how it changes shape patterns of Iraqi Kurdish nationalist movement from time to time as well as the influence behind the change.

Keywords: Iraq, Kurdish, Ethnonationalism

A. Pendahuluan

Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang secara politik menarik untuk diteliti, karena percaturan politik Timur Tengah sangat dinamis dan selalu berkembang setiap saat. Timur tengah merupakan kawasan yang sangat kaya akan kandungan alamnya, terutama minyak yang merupakan kebutuhan vital manusia. Namun selain memiliki kekayaan minyak, kawasan ini dikenal sebagai kawasan rawan konflik, salah satu alasan mengapa kawasan ini rawan akan konflik adalah karena keanekaragamannya, seperti keanekaragaman ekonomi, geografis, ideologi serta suku dan etnis.

Jika dilihat lebih cermat etnis merupakan elemen terpenting yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi, sosial, politik dan budaya suatu negara. Jika etnis dapat bekerja sama maka akan meminimalisir terjadinya konflik, jika tidak terjadi konflik maka akan lebih mudah bagi negara untuk mengontrol kegiatan politiknya. Irak yang merupakan salah satu negara di Timur Tengah juga memiliki latar belakang etnis yang beragam. Masalah etnis yang dihadapi Irak adalah mengenai keberadaan suku Kurdi. Kurdi merupakan salah satu etnis minoritas di negara yang dijuluki *land of fear* ini. Suku Kurdi menguasai seperlima wilayah Irak, khususnya wilayah Irak Utara. Etnis Kurdi memiliki cita-cita mendirikan negara Kurdistan merdeka, cita-cita ini merupakan harapan historis mereka sejak zaman leluhur dan konsep ini selalu diwariskan turun temurun.

Daerah Kurdistan atau Irak utara yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak dalam jumlah besar, lengkap dengan jalur-jalur pipa menuju Eropa dan Israel, menjadikan usaha etnis Kurdi untuk menjadi negara independen semakin sulit terealisasi. Setiap aktifitas untuk memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Keinginan yang dianggap Baghdad sebagai sebuah gerakan separatis merupakan alasan dibalik serangan militer Baghdad terhadap Kurdi. Pemilihan gaya penuntutan aspirasi gerakan etnonasionalisme Kurdi Irak yang cenderung menggunakan tindakan kekerasan perlu diteliti lebih dalam, karena dalam beberapa kasus gerakan etnonasionalisme di beberapa negara tidak selalu menggunakan cara kekerasan, contohnya seperti *Quiet Revolution Quebec* di Kanada yang berlangsung damai, serta pemisahan diri Ceko dan Slowakia dengan Uni Soviet. Namun cara ini tidak dilakukan oleh Kurdi Irak karena tidak adanya niat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara damai. Walaupun demokrasi Irak telah berkembang, sentimen etnis di Irak saat ini masih kuat sehingga masalah etnis di Irak dapat mengganjal stabilitas politik di Irak maupun di kawasan Timur Tengah. Dari observasi diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Asal Mula Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak, (2) Bagaimanakah Pola-pola Strategi Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (periode 1979-2012), (3) Kebijakan Apa sajakah yang Telah Dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pihak Luar Negeri dalam Mengakomodasi Kepentingan Kurdi Irak selama periode 1979-2012?, (4) Bagaimanakah Hasil dari Solusi tersebut?

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori konflik dan teori nasionalisme dan etnonasionalisme. Yang dimuat dalam teori konflik yaitu mengenai sumber konflik, model-model konflik, dan resolusi konflik dari sisi pihak ketiga. Sedangkan teori nasionalisme yaitu mengenai lahirnya nasionalisme berdasarkan pendekatan primordialisme dan pendekatan sosiobiologis. Terakhir adalah teori etnonasionalisme menjelaskan bentuk hubungan hirarki etnonasionalis dengan negara serta bentuk interaksi yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat permintaan dan pola pergerakan.

C. Metode Penelitian

Desain penelitian menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif yang berarti pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga dapat membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analitis adalah metode yang digunakan untuk menghimpun semua data dan kenyataan yang didapat secara sistematis sehingga diharapkan dapat menginterpretasikan secara mendalam dan juga memperlihatkan hubungan-hubungan antar fakta yang ada. Jadi penelitian ini mendeskripsikan dinamika gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak pada tahun 1979 hingga tahun 2012, dengan cara menghimpun data tentang bagaimana gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak lahir, mengkronologiskan segala kejadian-kejadian yang melibatkan Kurdi sebagai aktor pada periode tersebut serta kebijakan-kebijakan apa saja yang lahir pada periode tersebut.

Jenis data hasil penelitian ini adalah teks atau kata-kata tertulis yang akan memdeskripsikan atau mempresentasikan tindakan-tindakan dan fenomena yang terjadi. Data penelitian didapat melalui dua cara yaitu (1) data primer yang didapat langsung dari sumber atau pihak yang terlibat, ini

dilakukan dengan cara *In-depth Interview* kepada pengamat politik Timur Tengah yang mengerti seluk beluk percaturan politik Timur Tengah, (2) data sekunder yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya seperti melalui melalui pengamatan dan mendengar informasi dengan baik dari surat kabar, majalah, dokumen, berita, dan lain sebagainya yang bersifat literatur dan dokumenter.

D. Hasil Penelitian

Asal mula gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak terbentuk ketika perjanjian Skyess-Picott disahkan oleh Perancis dan Inggris. Perjanjian ini membagi daerah Mesopotamia yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Ottoman Turki menjadi beberapa negara-negara seperti Iran, Irak, Suriah dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Konsekuensi dari perjanjian ini adalah terpecahnya etnis Kurdi secara geografis dengan proporsi jumlah demografi terbesar berada pada negara Irak dan Turki. Pemberontakan pertama yang juga menandakan lahirnya gerakan nasionalisme Kurdi di Irak terjadi pada tahun 1919, Syakh Mahmud Barzanji memproklamkan perlawanan rakyat Kurdi Irak terhadap rezim kolonial Inggris, etnis Kurdi di Irak meminta Inggris meratifikasi perjanjian Sevres untuk menjadikan Kurdistan sebagai sebuah negara, namun karena daerah Kurdistan dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah perjanjian tersebut tidak pernah diratifikasi oleh Inggris. Keterampilan etnis Kurdi dalam melakukan gerilya, menggunakan taktik perang militer, dan menggunakan teknologi militer didapat dari leluhurnya yang ketika kependudukan Kerajaan Ottoman di Mesopotamia menjadi tentara Kerajaan Ottoman yaitu Kavaleri Hamidiyah.

Setelah Inggris keluar dari Irak, Monarki Irak berdiri secara mandiri. Seperti halnya Inggris monarki Irak tidak dapat mengakomodasi kepentingan Kurdi Irak dengan baik, padahal sebelum Inggris keluar dari Irak, tiga pihak yang mereka anggap penting dalam menjalankan pemerintahan baru Irak yaitu Monarki, Kurdi dan Angkatan Darat telah sepakat untuk memberikan Kurdi daerah otonomi khusus namun Monarki tidak memberikan hal tersebut karena menurut Monarki, Kurdi terlalu memaksa mereka untuk memberikan wilayah minyak Kirkuk kepada Kurdi. Setelah para pejuang republik berhasil merebut kekuasaan dari Monarki dan menjadikan Irak sebagai negara Republik. Kurdi Irak yang ikut berkoalisi dengan perjuangan nasionalis Irak pada saat itu dijanjikan akan mendapatkan wilayah otonomi, namun janji tersebut kembali tidak dikabulkan. Akibatnya timbulah sebuah pemberontakan baru pada masa rezim republik. Rezim Republik pada periode ini mencoba menawarkan perdamaian dengan memberikan kembali otonomi lewat perjanjian Maret 1970, namun harus gagal karena Kurdi resisten meminta penguasa memberikan wilayah minyak Kirkuk kepada mereka. Kurdi Irak pada periode ini membangun aliansi dengan Iran walaupun aliansi tersebut harus berakhir dengan singkat dan pemberontakan Kurdi di Irak harus berhenti. Dari paparan diatas dapat ditemukan kesimpulan bahwa Kurdi di Irak muncul ketika mereka terpisah dengan Kurdi lain yang wilayahnya telah menjadi sebuah negara, mereka membangun komunitas Kurdi baru di Irak setelah rezim-rezim yang menindas mereka memperlakukan mereka dengan semena-mena. Identitas Kurdi terbagi seiring dengan terpecahnya wilayah Kurdistan menjadi beberapa negara, pada saat itulah Kurdi Irak membentuk komunitas Kurdi dengan identitas baru di wilayah baru mereka dalam rangka melakukan perlawanan terhadap rezim yang represif.

Latar belakang kembalinya pemberontakan Kurdi di Irak pada tahun 1983 (*the rebellion of Kurds 1983*) adalah karena terjadinya Perang Teluk Pertama antara Irak dan Iran. Kurdi di Irak menganggap bahwa, Irak sedang dalam posisi lemah dan lengah karena perang bilateral tersebut. Selain itu, program Arabisasi Saddam Hussein kepada Kurdi Irak berdampak pada berkurangnya etnis Kurdi secara demografis di wilayah Kurdistan Irak Utara, sehingga Kurdi Irak melakukan pemberontakan dalam rangka perlindungan diri. Strategi yang diambil Kurdi Irak pada pemberontakan ini adalah dengan membangun aliansi bersama Iran. Kurdi Irak melakukan serangan kepada Baghdad dengan menggunakan taktik gerilya sedangkan Iran tetap dengan menggunakan perang konvensional dengan Baghdad. Dampak dari pemberontakan ini adalah lahirnya kebijakan Al-Anfal Saddam Hussein, kebijakan ini adalah kebijakan pemusnahan etnis Kurdi di Irak dengan menggunakan senjata kimia pada tahun 1988.

Kampanye ini menelan korban jiwa hingga hampir 20.000 jiwa, sedangkan ribuan jiwa lainnya memilih keluar dari Irak dan menetap di beberapa negara di Timur Tengah.

Pada tahun 1991, Kurdi Irak kembali melakukan pemberontakan baru melawan rezim represif Saddam Hussein. Alasan Kurdi kembali melakukan pemberontakan adalah karena Irak pada saat itu tengah mengalami ketidakstabilan politik setelah invasi mereka ke Kuwait digagalkan oleh pasukan PBB. Pada periode ini Kurdi gagal mendapatkan dukungan dari Amerika yang menolak masuk karena alasan tersandra oleh mandat PBB. Akhirnya Kurdi yang dipimpin oleh Partai PUK dan KDP membangun aliansi dengan tokoh-tokoh ideologis dan kaum religius akar rumput Kurdi. Pada periode ini Kurdi berhasil mengalahkan Baghdad dengan strategi gerilya *mount-city-mount*, dan kali ini Kurdi lebih rapi dalam melakukan pemberontakannya. Mereka tidak membiarkan kota yang mereka rebut tertinggal dalam keadaan “kosong”, mereka menempatkan beberapa petugas keamanan serta petugas administratif kota, sehingga setelah berhasil merebut wilayah tertentu, proses politik serta pelayanan masyarakat dapat kembali terlaksana. Pada periode ini sebelum Baghdad melakukan serangan balik dan memporak-porandakan Kurdi, PBB dengan sigap turun tangan dengan memberikan kebijakan 688 atau lebih dikenal dengan *No Fly Zone*. Kebijakan ini berhasil menjaga wilayah Kurdi Irak dari serangan pesawat Baghdad. Etnis Kurdi menyambut baik solusi ini, karena dengan adanya solusi ini, para elit politik Kurdi dapat menjalankan pemerintahan otonomi mereka secara *de facto* karena para loyalis Saddam Hussein di Irak Utara secara otomatis keluar dari Irak Utara. Kurdi merespon kebijakan ini dengan mengadakan pemilu parlemen dan pemilu pemimpin parlemen. Pada pemilu tahun 1992, KDP menang tipis mengalahkan PUK, namun mereka sepakat membagi Kursi parlemen daerah otonomi secara adil (50:50), pada pemilu pemimpin parlemen, terdapat dua calon pemimpin yang sudah tidak asing lagi bagi etnis Kurdi yaitu Massoud Barzani dan Jalal Talabani. Pemilu ini berjalan damai dan dimenangkan oleh Massoud Barzani.

Tahun 1994 merupakan tahun kelam bagi etnis Kurdi di Irak. Setelah mendapatkan wilayah otonomi mereka berkat resolusi 688 yang diberikan PBB, Kurdi Irak yang masih belum “fasih” berpolitik harus menghadapi perang saudara terburuk dalam sejarah etnis Kurdi. Latar belakang terjadinya perang saudara Kurdi Irak adalah permasalahan ekonomi. Setelah mendapatkan embargo dari Baghdad, mereka juga dihadapkan dengan embargo PBB terhadap Irak. Sehingga Kurdi yang baru saja menjalankan fungsi politiknya harus mengalami *double hit embargo*, yang berarti membahayakan devisa mereka. Sesungguhnya dalam mengatasi masalah pendapatan ekonomi, kedua Kurdi (KDP dan PUK) telah sepakat untuk melakukan perdagangan lintas negara dengan cara penyelundupan ke negara lain. Namun sistem pembagian kekuasaan berdasarkan basis partai dan pembagian pendapatan ekonomi berdasarkan azaz klientisme, menciptakan ketidakseimbangan pembangunan diantara wilayah Kurdi tersebut. Wilayah KDP yang lebih dekat dengan Turki sangat menguntungkan mereka karena Turki pada saat itu dianggap sebagai negara kaya yang intens melakukan perdagangan lintas negara dengan Kurdi, sedangkan PUK yang berbatasan dengan Iran harus gigit jari karena Iran tidak terlalu banyak melakukan aktifitas perdagangan. Karena alasan tersebut, PUK meminta kepada KDP untuk bersikap adil dan mengusulkan perubahan sistem pembagian pendapatan, namun KDP menolak hal tersebut berikut peta konflik KDP dan PUK yang digambarkan pada tabel dibawah ini;

Pihak Terlibat	Penyebab Konflik
Kurdistan Democratic Party	KDP tetap berpegang teguh dengan perjanjian pembagian wilayah kekuasaan secara administratif dan tetap setuju dengan pembagian pendapatan dengan sistem administratif klientisme
Patriotic Union Kurdistan	PUK inginkan adanya perubahan sistem pembagian pendapatan secara proporsional karena wilayah selatan Kurdistan yang sangat tidak strategis untuk

melakukan kegiatan ekonomi

Kedua partai yang berkonflik masing-masing membangun koalisi, KDP membangun koalisi dengan Turki dan Baghdad sedangkan PUK membangun koalisi dengan PPK Kurdi Turki dan Iran. Perang sipil ini berakhir berkat intervensi dari Amerika pada tahun 1998. Bill Clinton menggagas *Washington Agreement* yang berisikan lima poin perjanjian yang mereka setujui;

1. *Normalization in the main towns, Arbil, Sulaymaniyah and Dohuk; the return of the internally displaced people as a result of the conflict and the exchange of POWs.*
2. *The formation of an interim joint government and a united administration.*
3. *Establishing a transitional assembly that comprises the people who were elected in 1992 and lasts until a new assembly is elected; this was supposed to be done by July 1999.*
4. *The KDP is asked to “verse money steadily in the PUK area to create balance in development of the two areas”.*
5. *The PKK presence should end in the region and the security of the borders of Iran and Turkey should be observed “and protected from terrorists”.*

Implementasi perjanjian ini membutuhkan waktu dua tahun, baru pada tahun 2000, kedua Kurdi dapat mengimplementasikan poin perjanjian tersebut. Terundurnya proses implementasi karena kedua Kurdi masih kesulitan dengan penghapusan pembagian pendapatan berdasarkan klientisme. Namun setelah dua tahun berselang, hal itu dapat terselesaikan dan berhasil menghapus batas-batas wilayah di wilayah Kurdistan Irak.

Pada tahun 2003, para pemimpin Kurdi Irak mengambil keputusan penting dengan membuka wilayah mereka sebagai pangkalan militer Amerika dalam rangka menggulingkan Saddam Hussein. Kurdi mengambil kesempatan tersebut dengan harapan Amerika dapat menggulingkan Saddam Hussein, sehingga demokrasi dapat masuk ke Irak. Amerika dan Kurdi membangun aliansi dalam rangka melakukan serangan ke Baghdad. Namun, peran Kurdi tidak terlalu kuat karena Amerika tidak memberikan kekuasaan militer besar kepada Kurdi dengan alasan menghindari konflik etnis di masa depan. Sehingga Kurdi diberikan peran sebagai penjaga pos perbatasan dan pasukan pembersihan wilayah. Setelah Saddam Hussein tumbang, Amerika secara tidak langsung “menghadiahi” Kurdi Irak dengan otonomi khusus konstitusional. Wilayah Kurdi Irak dinyatakan sebagai wilayah otonomi khusus yang diakui oleh konstitusi dengan berbagai kekuasaan istimewa (memiliki pasukan sendiri, kebijakan luar negeri tanpa batas dan otoritas kewarganegaraan). Seperti yang tertuang pada pasal 4 dan 113 konstitusi Irak;

Act 4

“The Arabic language and the Kurdish language are the two official languages of Iraq. The right of Iraqis to educate their children in their mother tongue, such as Turkmen, Syriac, and Armenian shall be guaranteed in government educational institutions in accordance with educational guidelines, or in any other language in private educational institutions.”

Act 113

“First: This Constitution shall approbate the region of Kurdistan and its existing regional and federal authorities, at the time this constitution comes into force. Second: This Constitution shall approbate new regions established in accordance with its provisions.”

Setelah Konstitusi Irak di sahkan pada tahun 2005, beberapa bulan kemudian daerah otonomi Kurdi Irak berhasil mengisahkan konstitusi daerah otonomi Kurdi Irak. Konstitusi daerah otonomi secara garis besar menggambarkan dan menjelaskan kembali kekuasaan-kekuasaan luar biasa Kurdi Irak yang secara konstitusional diakui oleh negara.

Konflik terbaru yang melibatkan Kurdi Irak sebagai aktornya adalah konflik segitiga antara Kurdi Irak, Kurdi Turki (PKK) dan pemerintahan Turki. Latar belakang terjadinya konflik ini adalah karena peningkatan aktifitas terorisme separatis Kurdi Turki di wilayah Irak Utara. Pemerintah Turki menduga Kurdi Irak sengaja memberikan wilayah mereka sebagai *basecamp* gerakan separatis Kurdi Turki. Kurdi menampik hal tersebut, mereka tidak pernah memberikan daerah tersebut sebagai markas gerakan separatis. Kurdi mengakui bahwa daerah tersebut diberikan kepada Kurdi Turki, namun hanya sebagai daerah pengungsian bukan menjadi *basecamp* gerakan separatis Kurdi. Turki menuntut Kurdi Irak bertindak lebih tegas kepada Kurdi Turki di wilayah mereka. Namun Kurdi Irak menolak hal tersebut karena menurut mereka negosiasi merupakan cara yang paling tepat untuk menghentikan konflik ini. Mengingat tidak adanya tindakan tegas dari Kurdi Irak, pemerintah Turki mencoba meredam gerakan separatis Kurdi Irak dengan cara melakukan serangan militer lewat udara. Hal ini dikecam oleh Kurdi Irak karena hal tersebut telah menghina daerah otonomi Kurdi Irak. Untuk meredam konflik ini, Kurdi Irak berinisiatif untuk menjadi mediator antara Kurdi Turki dan pemerintah Turki. Inisiatif ini diambil karena adanya tuntutan dari konstituen Kurdi Irak untuk menyelesaikan konflik ini secara damai, karena mereka merasa berempati kepada Kurdi Turki yang menjadi korban serangan pesawat-pesawat Turki. Kurdi Irak memang bukan aktor primer dalam konflik ini, namun perannya menjadi sangat penting ketika mereka memutuskan diri untuk menjadi mediator konflik ini, berikut adalah gambaran peta konflik masalah ini;

Pihak Terlibat	Persepsi dan kepentingan pihak-pihak
Turki (Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Meredam gerakan nasionalisme PKK yang semakin intens melakukan serangan dari Irak Utara • Menuntut ketegasan pihak Kurdi Irak yang mengakomodasi kepentingan PKK dengan memberikan wilayah Irak Utara kepada PKK
PKK (Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemberontakan guna mencapai tujuan kemerdekaan atau otonomi serupa seperti Kurdi Irak di Turki

	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan pemimpin besar Abdullah Ocallan dari pengasingan
Kurdistan Regional Government (Sekunder)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan kebijakan akomodatif dibanding konfrontatif, dengan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak tanpa ada perbedaan • Meminta kedua belah pihak melakukan perundingan politik dan mencari jalan tengah tanpa mengedepankan ego masing-masing

Walaupun belum mendapatkan mandat dari dunia internasional, inisiatif Kurdi untuk memediasi konflik ini diapresiasi dunia Internasional, karena berhasil menghentikan konflik senjata yang telah terjadi. Namun Kurdi Irak diprediksi akan menemukan kesulitan dalam memediasi konflik ini, karena standart keinginan yang tinggi dari kedua belah pihak. Dibutuhkan kebijaksanaan Turki untuk mau memberikan keistimewaan terhadap etnis Kurdi Turki, karena tuntutan aspirasi Kurdi Turki merupakan konsekuensi dari adanya gerakan nasionalisme etnis di wilayah mereka. Proses *Continuing Fragmentation* Kurdi Turki terjadi karena mereka menginginkan nasib yang sama dengan Kurdi Irak. Keinginan ini telah menjadi harga mati, jika pemerintah Turki tidak mau melunak maka peran mediator tidak dapat berjalan baik.

Konflik kontemporer antara Baghdad dan Kurdi Irak terjadi karena perebutan wilayah kaya minyak Kirkuk. Sesungguhnya resolusi konflik Kirkuk telah tercantum pada konstitusi Irak pasal 140, tertulis bahwa referendum Kirkuk harus dilakukan dengan melakukan pemungutan suara masyarakat Kirkuk. Namun seiring berjalannya waktu Baghdad menolak resolusi yang telah disahkan dalam bentuk pasal pada konstitusi Irak. Muncul prasangka dari kedua belah pihak yang berkonflik, mulai dari isu eksodus besar-besaran warga Kurdi Irak ke Kirkuk hingga prasangka *Abuse of power* elite Baghdad kepada warga negara Irak. Berikut peta konflik sengketa Kirkuk;

Pihak yang terlibat	Alasan
Kurdi Irak (primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti tahap-tahap yang sudah tercantum pada konstitusi pasal 140 yaitu sensus dan referendum
Baghdad/Arab (primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggap konstitusi tidak sah karena menguntungkan pihak Kurdi jika referendum dilakukan

	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan solusi alternatif lain yaitu dengan negosiasi politik
Turkmen (sekunder)	<ul style="list-style-type: none"> • Menonaktifkan sementara pasal 140 konstitusi, hingga tercapai kesepakatan atau kesepakatan

Konflik antar etnis sangat mungkin terjadi di masa depan, mengingat sentimen etnis di Irak masih sangat besar. Untuk menghindari konflik etnis pada proses penyelesaian konflik ini membutuhkan beberapa tahap, pertama adalah dengan memberikan jaminan kepada masyarakat multikultur di Kirkuk atas kebutuhan dasar mereka (*non-negotiable needs*). Kedua, peran akar rumput dalam konflik ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi masuknya kepentingan-kepentingan politik negatif para elit yang memiliki kepentingan disana. Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara damai, bukan tidak mungkin PBB akan turun tangan dalam konflik ini, secara empiris kebijakan PBB atas kasus sengketa wilayah dalam suatu negara adalah dengan mengambil jalan tengah dan bukan tidak mungkin Kirkuk akan dijadikan sebuah daerah federal independen jika PBB mengintervensi konflik ini. Dengan kata lain tidak ada pihak yang akan mendapatkan wilayah ini.

E. Kesimpulan

Bahwa gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak lahir karena sentimen emosional yang telah lama dipelihara oleh etnis Kurdi itu sendiri. Kebencian emosional ini menurut teori etnonasionalisme Metta Spencer lahir karena adanya norma kolektif yang menjadi pedoman berperilaku para etnis Kurdi dibandingkan norma umum yang tumbuh di masyarakat, sehingga muncul sentimen *out-group* lebih baik daripada *in-group* tanpa adanya rasionalisasi yang jelas. Selain itu, karena tidak tercapainya segala kepentingan-kepentingan etnis Kurdi, muncul persepsi bahwa mereka adalah kaum yang ditindas kebebasannya. Hambatan-hambatan tersebut dijadikan etnis Kurdi sebagai pembenaran atas penindasan-penindasan yang menimpa mereka. Sehingga sebuah gerakan pemberontakan menjadi sesuatu yang sah dan benar adanya, ketika mereka menganggap diri mereka sebagai korban yang selalu ditindas dan harus bertahan hidup.

Alasan lain dari munculnya gerakan etnonasionalisme Kurdi adalah adanya kekuatan dominan dari etnis atau komunitas lain. Kasus lahirnya etnis Kurdi di Irak adalah karena adanya kekuatan-kekuatan dominan dari rezim-rezim yang berkuasa. Perubahan rezim tidak disertai dengan perubahan perilaku rezim tersebut, rezim yang selama ini menguasai Irak selalu bersikap represif kepada Kurdi, mulai dari rezim kolonial Inggris, Monarki hingga Republik tidak ada satupun dari rezim ini yang mau mengakomodasi kepentingan Kurdi.

Dalam setiap periode pemberontakan terdapat pula alasan-alasan ekonomi, seperti sengketa Kirkuk daerah kaya minyak antara Kurdi dan pemerintah Irak. Konflik ini dilatar belakangi oleh alasan-alasan ekonomi karena kedua belah pihak sama-sama tidak ingin kehilangan sumber pendapatan mereka, bagi Kurdi selain Kirkuk memiliki kekayaan alam,

daerah tersebut juga memiliki sisi historis yang sangat mendalam bagi etnis mereka. Sedangkan bagi Irak daerah tersebut merupakan daerah sumber daya utama dalam rangka mengisi pendapatan negara. Selain itu, para etnis Kurdi beranggapan jika mereka menjadi sebuah negara yang berdaulat atau mendapatkan kekuasaan khusus maka kebudayaan leluhur mereka dapat terus dilestarikan tanpa harus takut tergerus oleh pengaruh kebudayaan luar, maka dari itu komitmen akan perubahan untuk keluar dari rezim yang menurut mereka sangat tidak cocok dengan kebudayaan mereka sangat besar.

Pada masa rezim Saddam Hussein, pemberontakan Kurdi Irak menggunakan cara-cara militer atau kekerasan dan cenderung menginginkan perubahan besar-besaran dari segala sisi. Pola pergerakan revolusioner seperti ini lahir karena beberapa alasan, menurut Teori Interaksi Etnonasionalisme Chris Mandall terdapat tiga alasan yaitu pertama, karena tidak adanya *power sharing* seperti yang digambarkan oleh penulis pada bagian pembahasan bahwa pada periode kekuasaan Saddam Hussein, Kurdi sama sekali tidak mendapatkan wadah untuk merepresentasikan pandangan politiknya. Selain itu, ideologi Pan-Arabisme Saddam Hussein melahirkan kebijakan-kebijakan diskriminatif seperti Arabisasi dan kampanye Al-Anfal. Sehingga eksistensi dan legitimasi etnis Kurdi di Irak semakin berkurang. Kedua adalah *Regime Type*, ciri khas rezim Saddam Hussein yang cenderung otoriter dan tidak egaliter juga berpengaruh terhadap besarnya “volume” pemberontakan Kurdi yang terjadi di Irak. Daya tahan dan kualitas rezim di Irak yang tak kunjung berubah menjadikan *continuously* peningkatan pola tuntutan yang sebelumnya tidak terlalu keras berubah menjadi sebuah gerakan yang bersifat revolusioner progresif. Ketiga adalah *State Reputation*, evaluasi yang dilakukan Kurdi Irak atas perilaku pemerintah juga berpengaruh kepada strategi serta pola-pola pergerakan dalam menuntut aspirasi mereka. Konsistensi Kurdi pada platform penawaran aspirasi mereka juga menjadi alasan mengapa gerakan ini terus-menerus meningkatkan pemberontakannya. Kurdi selalu konsisten terhadap keinginannya, tidak berubah walaupun ada tekanan yang kuat dari negara.

Terjadi perubahan pola dan strategi pergerakan Kurdi Irak setelah demokratisasi terjadi di Irak. Terbukti dengan dua kasus konflik kontemporer yang melibatkan Kurdi Irak sebagai aktornya seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan. Kasus pertama adalah konflik Kurdi Irak, Kurdi Turki dan pemerintah Turki, dapat dilihat kebijaksanaan dan objektifitas Kurdi Irak dalam memandang konflik ini. Kurdi Irak bersikap objektif dan tidak memihak walaupun saudara mereka Kurdi Turki terlibat konflik dengan Ankara. Selain itu, Kurdi Irak bersikap sangat bijaksana dengan mencoba menjadi mediator dalam konflik ini, prinsip-prinsip perdamaian dipegang teguh oleh Kurdi Irak dalam mengakomodasi kedua kepentingan aktor-aktor primer dalam konflik ini. Kasus kedua adalah konflik sengketa Kirkuk antara Kurdi Irak dan Baghdad. Pada kasus ini, tidak terlihat indikasi Kurdi Irak akan melakukan kekerasan, Kurdi Irak seperti dalam pembahasan digambarkan mengedepankan cara-cara politik untuk menyelesaikan masalah ini. Dua kasus tersebut telah memperlihatkan perubahan pola dan strategi gerakan Kurdi Irak dalam menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini terjadi karena telah terpenuhinya hak-hak mereka seperti yang disebutkan oleh Chris Mandall sebelumnya, Kurdi Irak saat ini telah memiliki wadah dalam berpolitik (*sharing power*), perubahan rezim yang lebih demokratis juga berpengaruh dalam perubahan pola gerakan Kurdi Irak (*regime type*) dan kepercayaan Kurdi Irak terhadap pemerintah pusat semakin membaik (*state reputation*).

Seperti yang disebutkan sebelumnya rezim Saddam Hussein selama periode kekuasaannya tidak pernah mengakomodasi kepentingan Kurdi di Irak, maka dari itu bantuan serta solusi yang bersifat integratif lebih banyak berasal dari pihak ketiga atau pihak internasional. Peran pihak internasional dalam mengakomodasi kepentingan Kurdi Irak sangat besar, mulai dari peran formal seperti pemberian kebijakan *no fly zone* dari PBB, hingga informal seperti bantuan kemanusiaan yang sangat membantu keberlangsungan hidup etnis Kurdi di Irak.

Peran pihak ketiga sebagai seorang pengarah (*director*) lebih sering terjadi dibandingkan dengan peran sebagai penengah. Peran penengah hanya diberikan oleh pihak asing ketika perang saudara antara Kurdi Irak terjadi yaitu pemberian *Washington Agreement* dari Presiden Amerika Bill Clinton. Sedangkan peran sebagai pengarah diambil oleh Amerika ketika solusi *no fly zone* pada tahun 1991 dan bantuan transisi demokrasi terjadi di Irak pada tahun 2003. Kedatangan pihak ketiga dalam mengakomodasi kepentingan Kurdi di Irak bukan terjadi karena “undangan” dari Kurdi Irak maupun dari pemerintahan Saddam Hussein, pihak ketiga muncul bukan karena adanya panggilan dari kedua aktor melainkan dari inisiatif sendiri serta izin dari lembaga internasional.

Hasil dari kebijakan-kebijakan integratif yang diberikan pihak ketiga secara keseluruhan berdampak positif bagi Kurdi Irak. Terbukti dengan adanya progres positif setelah pemberian kebijakan tersebut. Pertama, pemberian *no fly zone* telah menghasilkan otonomi *de facto* daerah Irak Utara yang juga melahirkan sejarah pemilihan umum pertama Kurdi di Irak pada tahun 1992. Kedua, pemberian kebijakan perjanjian Washington oleh Amerika telah menghilangkan batas-batas yang telah cukup lama menjadi masalah internal Kurdi Irak. Ketiga adalah ketika masa transisi di Irak pada tahun 2003, peran dunia internasional khususnya Amerika yang pada saat itu bertanggung jawab atas proses transisi pemerintahan di Irak telah memberikan kesempatan bagi Kurdi untuk berpartisipasi dalam proses transisi pemerintahan. Dapat disimpulkan dalam setiap pergerakan Kurdi Irak, pihak ketiga merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam dinamika gerakan etnis Kurdi di Irak.

F. Rekomendasi

Berdasarkan data penelitian, diskusi serta kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan mengenai isu-isu etnis Kurdi khususnya di Irak. Saran dan rekomendasi ini diberikan untuk menghindari cara-cara kekerasan dalam penyelesaian konflik yang melibatkan Kurdi Irak sebagai aktor dalam setiap konflik.

Pertama, peran dari pihak Kurdi itu sendiri yaitu dengan memberikan pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada masyarakat sipil Kurdi di Irak Utara. Ini perlu karena *federalism-tribalism* telah terlanjur diterapkan oleh negara Irak, dan cara untuk mengurangi gesekan-gesekan antar suku dan etnis di Irak di masa depan adalah dengan memberikan pendidikan politik kewarganegaraan, sehingga dapat menghilangkan stigma “*in group is*

better than out group” serta melahirkan prinsip egaliter antara Kurdi dan Arab di Irak pada level *civil society*.

Kedua, peran dari pemerintah otonomi Kurdi dan pemerintah nasional Irak. Interaksi dan konsolidasi antar dua penguasa ini perlu diperbaiki, contoh terbaru adalah kasus sengketa wilayah minyak Kirkuk. Kurdi dan pemerintah pusat hingga saat ini tidak dapat menemukan solusi permasalahan sengketa wilayah, terhitung lima tahun kasus sengketa wilayah ini terjadi dan belum terselesaikan. Tidak adanya persamaan persepsi atas penyelesaian konflik Kirkuk dapat menjadi bumerang bagi kedua belah pihak, karena konflik geografis akan menjadi sumbu awal atas terjadinya konflik etnis di masa depan, karena konflik ini sangat kental dengan nuansa etnisitas dibandingkan dengan dengan nuansa politiknya. Kedua pemerintah harus menghilangkan ego masing-masing demi terciptanya persepsi Irak sebagai suatu bangsa yang berdaulat, karena selama ini paham etnosentrisme yang lebih tumbuh subur di Irak.

Ketiga adalah perhatian internasional khususnya Amerika yang berperan penting dalam lahirnya demokrasi di Irak. Amerika yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan etnis Kurdi di Irak harus merubah sikap menjadi lebih netral, karena jika Amerika memihak kepada salah satu etnis (Kurdi) di Irak makan akan membuat Kurdi merasa lebih superior dibanding suku lain. Seperti yang tertulis dalam pembahasan bahwa Kurdi Irak dalam sejarahnya akan semakin kuat ketika mendapat bantuan dari “tetangga”, Amerika harus membuang jauh sikap politik balas budi demi tercipta keseimbangan demokrasi

G. Daftar Pustaka

Ariwibowo . 2007 .*Teori Konflik : Tinjauan Teoritis* . Bandung : PT . Puskasi Stks.

Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Collins , Randall . 2012 . *A Theory of the Time-Dynamics of Conflict* . Pennsylvania : American Sociological Review

Daulay , Richard . 2009 . *Amerika vs Irak : Bahaya Politisasi Agama* . Jakarta : PT . Libri.

Kuncahyono , Trias . 2005 . *Irak Korban Kaum Hawkish* . Jakarta : Buku Kompas.

Lefebvre, Stéphane. 2003. *Perspectives On Ethno-Nationalist/Separatist Terrorism*. Camberley : Conflict Studies Research Center.

Llobera, Josep. 1999 . *Recent Theories of Nationalism*. London :University of Collage Press.

Moeleong , Lexy . 2004 . *Metode Kualitatif Edisi Revisi* . Bandung : Rosda

- Mandal , Christer . 2009 . *The Challenge From Within : Multilevel Analysis of Ethnic Separatist Demand 1999 – 2003* . Thesis . University of Bergen.
- Maris , Masri . 2005 . *Konflik Internal dan Interpretasi Masa Depan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Ocalan , Abdullah . 2008 . *War and Peace in Kurdistan Perspectives for a political solution of the Kurdish question* . Cologne : International Initiative.
- Pruitt ,Dean G., dan RubinJeffrey Z,. 2004 .*Teori Konflik Sosial* . Yogyakarta : PT .Pustaka Pelajar.
- Rushton , J. Philippe ., 2005 . *Ethnic nationalism, evolutionary psychology and Genetic SimilarityTheory*. Ontario : Department of Psychology, University of Western Ontario Press.
- Sandepp , Dr. Chawla . 2005. *Nationalism* . Bekerley: Jolis Moliis Journal Publisher.
- Sihbudi , Riza . 1993 . *Konflik dan Diplomasi Timur Tengah* . Bandung : Eresco Ikapi.
- Suharsimi , Arikunto . 1998 . *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta : PT . Elekmedia Komputindo.